



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T

JL. SOEKARNO HATTA, TELP : (0474) 321455, FAX : (0474) 321455, Email : inspektoralutim@gmail.com
M A L I L I, 92981

LAPORAN HASIL HASIL REVIU
RKA – SKPD POKOK
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 700/156/X/ITKAB
TANGGAL : 13 OKTOBER 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, TELP : (0474) 321455, FAX: (0474) 321455, Email : inspektoratlutim@gmail.com

MALILI, 92981

LAPORAN HASIL REVIU RKA – SKPD POKOK
DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 700/156/X/ITKAB.
TANGGAL : 13 OKTOBER 2023

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	[.2.]
II. Dasar Hukum	[.5.]
III. Tujuan Reviu	[.6.]
IV. Ruang Lingkup Reviu	[.6.]
V. Metodologi Reviu	[.6.]
VI. Gambaran Umum	[.7.]
VII. Uraian Hasil Reviu	[.8.]
VIII. Apresiasi	[.11.]

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD POKOK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, Nomor: 188.342/6/PEM-LT/VIII/2022 dan Nomor: 188.342/5/DPRD-LT/III/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- b. Sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor: 094/326/X/ITIKAB tanggal 04 Oktober 2023 untuk melakukan reviu RKA-SKPD Pokok pada Sekretariat DPRD, Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSUD I Lagaligo,

Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Puskesmas Burau, Puskesmas Wotu, dan Puskesmas Bonepute Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. 43 sub kegiatan telah dilengkapi dengan TOR/KAK
- b. Telah dilengkapi dengan Kartu Inventaris Barang (KIB)
- c. Telah dilengkapi dengan RKBMD/RKPBMD

2. Pengujian kesesuaian RKA SKPD dengan PPAS

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dalam RKA telah sesuai dengan PPAS 2023.

3. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan :

- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp274.750.000,-
- b. Retribusi penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan Rp217.000.000,-

4. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. Belanja operasi dalam RKA sebesar Rp8.412.654.956,-
- b. Belanja modal dalam RKA sebesar Rp3.304.287.044,-
- c. Terdapat 43 sub kegiatan dalam RKA telah dilengkapi dengan TOR/KAK
- d. Terdapat Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pimpinan
- e. Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Modal Bangunan Parkir tidak dilengkapi RAB

- f. Terdapat Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan tidak dilengkapi RAB
- g. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja mesin pompa celup dan Belanja timbangan duduk) tidak terdapat pada RKBMD
- h. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Shiever dan Belanja Mesin Press Gudang Rumput laut) tidak terdapat pada RKBMD
- i. Terdapat Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja Kerja) Melebihi harga RKBMD

5. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah

6. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. Koreksi/Perbaikan

Dari hasil reuiu RKA SKPD pada Dinas Perikanan **tidak** melakukan perbaikan/koreksi terhadap simpulan dan rekomendasi Catatan atas Hasil Reuiu (CaHR) RKA SKPD TA. 2022. Catatan atas Hasil (CaHR) reuiu terlampir.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reuiu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Edaran Kepala Daerah Nomor : 900/5215/BUP tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD T.A 2023;
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 094/326/X/ITIKAB, tanggal 04 Oktober 2023 untuk melakukan reviu RKA-SKPD Pokok pada Sekretariat DPRD, Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSUD I Lagaligo, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Puskesmas Burau, Puskesmas Wotu, dan Puskesmas Bonepute Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD Pokok Dinas Perikanan TA 2023 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD Pokok sesuai dengan KUA/PPAS Perubahan serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD Pokok.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD Pokok. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen KUA-PPAS Pokok, Alokasi Anggaran Pendapatan Daerah (PAD), Alokasi Anggaran Belanja Daerah, Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan serta dokumen lain yang mendukung, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKA-SKPD Pokok Dinas PerikN TA 2023 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Reviu atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun 2023.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD Dinas Perikanan TA 2023.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/326/X/ITKAB tanggal 04 Oktober 2022, dengan susunan tim sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	Jabatan Dalam Tim
1	Salam Latief, SH, M. Si	19690403 198903 1 007	PenanggungJawab
2	Alamsyah Perkesi, M. Si	19720114 200604 1 005	Wakil Penanggung Jawab
3	Herpik, SKM., M.Kes	19660814 198903 1 016	Pengendali Teknis
4	Ephraim Ronal P, ST., M.Si	19770825 201001 1 015	Ketua
5	Suhaeni, S.Pt	19830612 201001 2 023	Anggota
6	Dian Eko Prakoso, SH	19910926 201503 1 004	Anggota
7	Idiyanty, SP	19751212 200312 2 007	Anggota

Reviu RKA-SKPD Pokok TA 2023 sesuai surat tugas dilaksanakan mulai tanggal 04 s/d 13 Oktober 2023.

VI. GAMBARAN UMUM

1. Proses penyusunan RKA-SKPD Pokok merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD. Berikut secara singkat kami jelaskan proses penyusunan RKA-SKPD Pokok sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Pokok.
 - a. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan sehingga PPA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD Pokok;
 - b. Sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah sinergitas program kerja tahun berikutnya antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - c. Selanjutnya hasil diskusi Forum SKPD yang telah disepakati dimuat dalam Berita Acara Forum SKPD dalam rangka sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran berikutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah;
 - d. RKA-SKPD Pokok yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD Pokok, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
 - f. RKA-SKPD Pokok memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

2. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan PPA pokok TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Pokok sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pokok Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD, Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Pokok mencakup: Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD batas waktu penyampaian RKA-SKPD Pokok kepada PPKD, dan dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD Pokok, analisis standar belanja dan standar satuan harga
3. Program RKA-SKPD Pokok Dinas Perikanan, yaitu:

No.	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.205.833.876,-
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.410.592.500,-
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.875.108.324,-
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	78.407.500,-
5	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.147.000.000,-
J U M L A H		11.716.942.200,-

VII. URAIAN HASIL REVIU

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. 43 sub kegiatan telah dilengkapi dengan TOR/KAK
- b. Telah dilengkapi dengan Kartu Inventaris Barang (KIB)
- c. Telah dilengkapi dengan RKBMD/RKPBMD

2. Pengujian kesesuaian RKA SKPD dengan PPAS

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dalam RKA telah sesuai dengan PPAS 2023.

3. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan :

- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp274.750.000,-
- b. Retribusi penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan Rp217.000.000,-

4. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil reviu disimpulkan:

- a. Belanja operasi dalam RKA sebesar Rp8.412.654.956,-
- b. Belanja modal dalam RKA sebesar Rp3.304.287.044,-
- c. Terdapat 43 sub kegiatan dalam RKA telah dilengkapi dengan TOR/KAK
- d. Terdapat Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pimpinan
- e. Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Modal Bangunan Parkir tidak dilengkapi RAB
- f. Terdapat Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan tidak dilengkapi RAB
- g. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja mesin pompa celup dan Belanja timbangan duduk) tidak terdapat pada RKBMD
- h. Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Shiever dan Belanja Mesin Press Gudang Rumput laut) tidak terdapat pada RKBMD
- i. Terdapat Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja Kerja) Melebihi harga RKBMD

5. Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah

6. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. Rekomendasi

1. Lengkapi rincian perhitungan pendapatan
2. Lengkapi dengan Surat Persetujuan pimpinan atas Belanja Modal kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
3. Lengkapi dengan RAB atas belanja modal Bangunan gedung kantor dan Belanja Modal Bangunan Parkir
4. Lengkapi dengan RAB atas Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
5. Agar Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja mesin pompa celup dan Belanja timbangan duduk) terdapat pada RKBMD
6. Agar Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Shiever dan Belanja Mesin Press Gudang Rumput laut) terdapat pada RKBMD
7. Sesuaikan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja Kerja) pada RKA dengan harga yang ada pada RKBMD
8. Untuk pemeliharaan gedung cantumkan perhitungan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor yang berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 235/F-04/VI/Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

8. Koreksi/Perbaikan

Dari hasil reuiu RKA SKPD pada Dinas Perikanan **tidak** melakukan perbaikan/koreksi terhadap simpulan dan rekomendasi Catatan atas Hasil Reuiu (CaHR) RKA SKPD TA. 2022. Catatan atas Hasil (CaHR) reuiu terlampir

VIII. APRESIASI

Kami Tim reuiu Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perikanan atas bantuan dan kerjasama dari Kepala Dinas dan jajarannya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan,

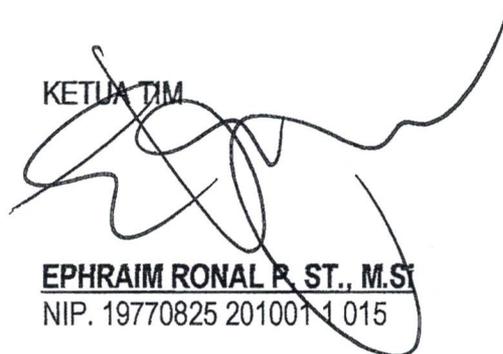
sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Pokok Dinas Perikanan tahun anggaran 2023.

PENGENDALI TEKNIS



HERPIK, SKM., M.Kes
NIP. 19860814 198903 1 016

KETUA TIM



EPHRAIM RONAL P. ST., M.ST
NIP. 19770825 201001 1 015

INSPEKTUR
PENANGGUNG JAWAB,



SALAM LATIEF, SH. M.Si. CGAE
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN HASIL REVIU ATAS KUA-PPAS/RKA-POKOK SKPD

DINAS PERIKANAN

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun oleh / Tanggal :

Diteliti oleh / Tanggal : FERDIANTO,SH/1 September 2022

Disetujui oleh / Tanggal : HERPIK, S.KM, M.Kes/1 September 2022

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor : 094/326/IX/ITKAB tanggal 3 Oktober 2022 untuk melakukan reviu atas RKA POKOK-OPD DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Indikatif TA 2023 pada DINAS PERIKANAN sebesar Rp 11.716.942.200,- dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			
		Pegawai	Belanja Operasi	Modal	Jumlah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,412,654,956	3,304,287,244		11,716,942,200
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,142,433,876	1,063,400,000		5,205,833,876
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,459,500	0		79,459,500
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)	38,395,500	0		38,395,500
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perikanan)	4,728,000	0		4,728,000
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perikanan)	5,918,000	0		5,918,000
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)	30,418,000	0		30,418,000
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,107,837,526	0		3,107,837,526
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)	3,032,123,526	0		3,032,123,526
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)	75,714,000	0		75,714,000
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32,998,000	0		32,998,000
3 25 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perikanan)	32,998,000	0		32,998,000
3 25 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13,209,000	0		13,209,000
3 25 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Perikanan)	13,209,000	0		13,209,000
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106,782,000	0		106,782,000
3 25 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Perikanan)	37,192,000	0		37,192,000
3 25 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perikanan)	69,590,000	0		69,590,000
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435,987,850	214,000,000		649,987,850
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perikanan)	6,864,000	0		6,864,000
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)	-	214,000,000		214,000,000
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)	9,224,250	0		9,224,250
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perikanan)	10,070,000	0		10,070,000

3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perikanan)	5,100,000	0	5,100,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Perikanan)	7,200,000	0	7,200,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)	397,529,600	0	397,529,600
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	555,000,000	555,000,000
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		550,000,000	550,000,000
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	-	5,000,000	5,000,000
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,900,000	0	239,900,000
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)	3,500,000	0	3,500,000
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)	79,800,000	0	79,800,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)	156,600,000	0	156,600,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126,260,000	294,400,000	420,660,000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)	74,210,000	0	74,210,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)	23,450,000	0	23,450,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perikanan)	28,600,000	294,400,000	323,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2,064,000,000	346,592,500	2,410,592,500
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,816,234,630	286,592,500	2,102,827,130
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dinas Perikanan)	66,234,630	0	66,234,630
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)	-	286,592,500	286,592,500
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)	1,750,000,000	0	1,750,000,000
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	247,765,370	0	247,765,370
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	42,065,370	0	42,065,370
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	205,700,000	0	205,700,000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	60,000,000	60,000,000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	60,000,000	60,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,455,929,100	1,419,179,224	2,875,108,324
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	186,877,210	0	186,877,210
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)	19,860,245	0	19,860,245
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dinas Perikanan)	38,990,445	0	38,990,445
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)	128,026,520	0	128,026,520
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,269,051,890	1,419,179,224	2,688,231,114
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	71,693,215	0	71,693,215

3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	-	1,198,800,000		1,198,800,000
3	25	04	2.04	03	Perjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	841,500,000	216,379,224		1,057,879,224
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	75,694,875	0		75,694,875
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)	280,163,800	4,000,000		284,163,800
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	78,407,500	0		78,407,500
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	78,407,500	0		78,407,500
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	78,407,500	0		78,407,500
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	671,884,480	475,115,520		1,147,000,000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	148,749,480	0		148,749,480
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	148,749,480	0		148,749,480
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	125,295,000	0		125,295,000
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)	125,295,000	0		125,295,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	397,840,000	475,115,520		872,955,520
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	397,840,000	475,115,520		872,955,520

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.342/6/PEM-LT/VIII/2022 dan Nomor : 188.342/5/DPRD-LT/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran DINAS PERIKANAN Kabupaten Luwu Timur TA. 2023 sebesar Rp. 11.716.942.200,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Prioritas Program dan Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Organisasi	Jumlah Plafon Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11,716,942,200
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,205,833,876
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			79,459,500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)			38,395,500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perikanan)			4,728,000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perikanan)			5,918,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perikanan)			30,418,000

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,107,837,526
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perikanan)		3,032,123,526
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perikanan)		75,714,000
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		32,998,000
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perikanan)		32,998,000
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		13,209,000
9	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Perikanan)		13,209,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		106,782,000
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Perikanan)		37,192,000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perikanan)		69,590,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		649,987,850
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perikanan)		6,864,000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perikanan)		214,000,000
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perikanan)		9,224,250
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perikanan)		10,070,000
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perikanan)		5,100,000
17	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Perikanan)		7,200,000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perikanan)		397,529,600
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		555,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		550,000,000
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)		5,000,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239,900,000
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perikanan)		3,500,000
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perikanan)		79,800,000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perikanan)		156,600,000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420,660,000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perikanan)		74,210,000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perikanan)		23,450,000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perikanan)		323,000,000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2,410,592,500

9	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2,102,827,130
26	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dinas Perikanan)			66,234,630
27	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)			286,592,500
28	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan)			1,750,000,000
10	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			247,765,370
29	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)			42,065,370
30	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)			205,700,000
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			60,000,000
31	Pelayanan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)			60,000,000
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2,875,108,324
12	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			186,877,210
32	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (Dinas Perikanan)			19,860,245
33	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dinas Perikanan)			38,990,445
34	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan)			128,026,520
13	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			2,688,231,114
35	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)			71,693,215
36	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)			1,198,800,000
37	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)			1,057,879,224
38	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)			75,694,875
39	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Dinas Perikanan)			284,163,800
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			78,407,500
14	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			78,407,500
40	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)			78,407,500
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1,147,000,000
15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			148,749,480

41	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)		148,749,480
16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		125,295,000
42	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dinas Perikanan)		125,295,000
17	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		872,955,520
43	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)		872,955,520

1 Pengujian atas kelengkapan dokumen

- 1 Telah dilengkapi Rancangan akhir KUA dan PPAS
- 2 Telah dilengkapi Perencanaan Kebutuhan RKPBM dan RKBMD
- 3 Telah dilengkapi dengan TOR/KAK
- 4 Tidak dilengkapi rincian perhitungan pendapatan

2 Uji Kesesuaian RKA SKPD dan PPAS

Dari 5 (Lima) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan telah sesuai dengan PPAS

3 Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah

Berdasarkan hasil revidi disimpulkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| 1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 274,750,000 |
| 2 Retribusi penjualan Produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan | 217,000,000 |

4 Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah

1 Rencana Belanja Operasi Dalam RKA SKPD

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1 Belanja pegawai, antara lain: | |
| a. Gaji ASN | 1,729,683,526 |
| b. TPP ASN | 1,302,440,000 |
| 2 Belanja barang dan jasa | 5,312,851,430 |

2 Rencana Belanja Modal

- | | |
|---|---------------|
| 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,048,415,520 |
| 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1,057,071,724 |
| 3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Ieigasi | 1,198,800,000 |

- Terdapat Belanja Modal kendaraan Dinas Bermotor Perorangan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan pimpinan
- Terdapat Belanja Modal Bangunan gedung kantor dan Belanja Modal Bangunan Parkir tidak dilengkapi dengan RAB
- Terdapat Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan tidak dilengkapi dengan RAB
- Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja mesin pompa celup dan Belanja timbangan duduk) tidak terdapat pada RKBMD
- Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Shiever dan Belanja Mesin Press Gudang Rumput laut) tidak terdapat pada RKBMD
- Terdapat Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja Kerja) Melebihi harga RKBMD

5 Pengujian Atas Kewajaran Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah

- 1 Tidak ada besaran penerimaan pembiayaan daerah
- 2 Tidak ada besaran BTT dalam RKA SKPD

6 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1 Tidak ada besaran pengeluaran pembiayaan daerah
- 2 Tidak ada besaran penerimaan pembiayaan daerah dalam RKA SKPD

7 Rekomendasi

- 1 Lengkapi rincian perhitungan pendapatan
- 2 Lengkapi dengan Surat Persetujuan pimpinan atas Belanja Modal kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- 3 Lengkapi dengan RAB atas belanja modal Bangunan gedung kantor dan Belanja Modal Bangunan Parkir
- 4 Lengkapi dengan RAB atas Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim@gmail.com
MALILI, 92981

SURAT TUGAS

Nomor : 094/~~370~~/X/ITKAB

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur Nomor : 900/1127/BKAD tanggal 16 September 2022 perihal Permintaan Reviu RKA TA. 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini memberi tugas kepada :

NO	Nama/Nip	Jabatan	Jumlah Hari
1	SALAM LATIEF, SH. M.Si 19690403 198903 1 007	Penanggung Jawab Tim	3
2	ALAMSYAH PERKESI, M.Si 19720114 200604 1 005	Wakil Penanggung Jawab Tim	3
3	HERPIK, SKM., M.Kes 19660814 198903 1 016	Pengendali Teknis	10
4	EPHRAIM RONAL P, ST., M.Si 19770825 201001 1 015	Ketua Tim	10
5	SUHAENI, S.Pt 19830612 201001 2 023	Anggota Tim	10
6	DIAN EKO PRAKOSO, SH 19910926 201503 1 004	Anggota Tim	10
7	IDIYANTY, SP 19751212 200312 2 007	Anggota Tim	10

Untuk : Melakukan Reviu RKA Pokok TA. 2023 pada Sekretariat DPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSUD I Lagaligo, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Puskesmas Burau, Puskesmas Wotu, dan Puskesmas Bonepute.

Biaya yang berhubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan Tim tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dari pihak terkait dengan obyek pemeriksaan

Lama Penugasan 10 (Sepuluh) hari mulai tanggal 4 s/d 13 Oktober 2022

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Malili
Pada tanggal 4 Oktober 2022

INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH., M.SI

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala OPD terkait Masing-Masing di Tempat.

- 5 Agar Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja mesin pompa celup dan Belanja timbangan duduk) terdapat pada RKBMD
- 6 Agar Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Belanja Shiever dan Belanja Mesin Press Gudang Rumput laut) terdapat pada RKBMD
- 7 Sesuaikan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Meja Kerja) pada RKA dengan harga yang ada pada RKBMD
- 8 Untuk pemeliharaan gedung cantumkan perhitungan untuk belanja pemeliharaan gedung kantor yang berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 235/F-04/VI/Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

8 Agar OPD Melakukan Perbaikan atau koreksi terhadap simpulan CAHR

<p>Kepala Dinas Perikanan</p>	<p>Pengendali Teknis</p>
 <p><u>Drs. Alimuddin Nasir, M.Si</u> NIP. 19665022000031004</p>	 <p><u>HERPIK, S.KM, M.Kes</u> NIP. 196603141989031016</p>